

TATA INDONESIA BAGI MARHAEN

Didik Suhariyanto

Universitas Bung Karno Jakarta
Email : suhariyanto.didik@yahoo.co.id

Abstract

Kaum Marhaen melaksanakan tujuan perjuangannya yaitu perbaikan nasib untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur tanpa penindasan dan penghisapan, tanpa kapitalisme dan imperialisme. Tata Indonesia bagi Marhaen yaitu tatanan negara untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar cita-cita negara yaitu mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanaakan ketertiban dunia, dengan dasar cita-cita Proklamasi yang diejawantahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tata Indonesia dilaksanakan berdasarkan Marhaenisme sebagai akar dari Pancasila yang merupakan dasar negara.

Kata Kunci : tata indonesia, marhaen, kapitalisme, imperialisme

Latar Belakang

Tata atau aturan dan susunan cita-cita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia memiliki histori yang panjang sebagai pondasi yaitu mewujudkan rakyat yang adil dan makmur. Wujud masyarakat adil dan makmur ditopang dengan wilayah dan kekayaan alam yang dimiliki oleh setiap bangsa. Tetapi faktanya bangsa yang kaya menjadi bangsa yang miskin dan rakyatnya sengsara dan menderita.

Sebelum jaman kemerdekaan nasib rakyat sengsara dan menderita, pada suatu hari Sukarno (Proklamator bangsa Indonesia) berjalan-jalan naik sepeda di kota Bandung di desa Cigareng. Ia melihat seseorang petani lelaki yang sedang bekerja di sawah. Dalam tanya jawab ia tahu bahwa alat cangkul yang digunakan oleh orang petani itu adalah milik petani itu sendiri, tanah yang digarapnya juga miliknya sendiri, hasil padi yang dipanen juga miliknya sendiri.

Tetapi petani itu hidupnya miskin, sengsara, rumahnya gubug dan jelas orang itu bukan buruh yang hidupnya tergantung pada majikan. Karena ia tidak menerima upah dari siapapun, maka ia bukan buruh atau proletar yang digaji. Walaupun ia memiliki tanah, cangkul sebagai alat produksi ia tetap miskin.

Sukarno (Bung Karno) melihat sekelilingnya semua serba miskin. Kemudian ia menanyakan nama petani muda itu ia menyebut namanya Marhaen. Marhaen adalah simbol kesengsaraan dan kemiskinan akibat kolonialisme dan imperialisme Belanda. Sukarno menyebut Marhaen yang terdiri dari aneka ragam rakyat miskin atau rakyat kecil yang digerakkan untuk melawan penjajahan.

Hampir seluruh rakyat Indonesia adalah Marhaen ! Yaitu rakyat jembel, ya buruh jembel, ya tani jembel, ya nelayan jembel, ya tukang warung jembel, ya kusir jembel, ya sopir jembel, semuanya itu tercakup dalam satu perkataan "Marhaen" (Sukarno, 2002). Aneka ragam rakyat kecil, wong cilik yang sengsara perlu dipersatukan mencapai tujuan melawan penjajahan. Persatuan kaum Marhaen harus mempunyai watak revolusioner menentang imperialisme.

Dalam mencapai Indonesia Merdeka, menggerakkan hatinya untuk bergerak ialah tuntutan perbaikan nasib rakyat. Bergerak karena kesengsaraan rakyat, bergerak untuk hidup lebih layak dan sempurna. Bergerak tidak karena ideal saja, bergerak karena ingin cukup makanan, perumahan, pendidikan, cukup minimum seni dan kultur, pendek kata bergerak karena ingin perbaikan nasib di dalam segala bagian-bagian dan cabang-cabangnya. Perbaikan nasib ini hanya bisa datang bilamana dalam masyarakat sudah tidak ada kapitalisme dan imperialisme. Sebab *stelsel* inilah sebagai penyakit yang tumbuh di atas tubuh kita.

Untuk menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme diperlukan persatuan kaum Marhaen yang sanggup mengadakan massa-aksi. Massa-aksi selalu menjadi pengantar dan langkah dalam satu pergerakan massa yang sadar radikal. Hanya massa-aksi yang sadar dan radikal yang dapat digunakan untuk menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme.

Kaum Marhaen harus tetap berpegang pada tujuan perjuangannya yaitu : perbaikan nasib hanya dicapai dalam masyarakat yang adil dan makmur tanpa penindasan dan penghisapan, tanpa kapitalisme dan imperialisme. Oleh karena itu kaum Marhaen mempunyai tugas suci membangun masyarakat adil dan makmur tanpa penindasan dan penghisapan, tanpa kapitalisme dan imperialisme. Masyarakat demikian adalah masyarakat sosialis. Masyarakat sosialis yang demikian hanya dapat dibangun dalam negara merdeka. Oleh karena itu syarat utama untuk mencapai tujuan perbaikan nasib ialah mencapai kemerdekaan. Selama belum merdeka tidak bisa bebas bergerak. Masyarakat yang adil makmur dan sejahtera hanya dapat dibangun oleh para Marhaen.

Menurut Bung Karno : tujuan revolusi yang dibuat oleh Revolusi sendiri, yang ditujukan oleh Revolusi sendiri, engkau tidak bisa mengubah. Demikian pula satu dunia baru tanpa *exploitation de nation par nation*. Itupun tujuan Revolusi yang tidak bisa kita ubah (Sukarno, 1965a). Bagaimana Tata Indonesia yang adil makmur dan berkesejahteraan sosial bagi seluruh Marhaen di Indonesia.

Kapitalisme dan Imperialisme

Kapitalisme adalah sistem pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi (membikin suatu barang) yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi. Kapitalisme timbul dari cara produksi yang oleh karenanya menjadi nilai lebih (tambahnya harga oleh kerjanya yang membuat) tidak jatuh di dalam tangan buruh melainkan jatuh di dalam tangan kaum majikan.

Kapitalisme menyebabkan akumulasi kapital (penimbunan kapital), konsentrasi kapital (kapital kecil-kecil menjadi satu kapital besar) sentralisasi kapital (kapital besar-besar menjadi satu kapital besar), dan *industrielle Reserve-armee* (tentara kaum penganggur). Kapitalisme mempunyai arah kepada *verelendung* (memelaratkan kaum buruh) (Sukarno,1965b). Kapitalisme bukan suatu badan, bukan manusia, bukan suatu bangsa tetapi ialah suatu paham, suatu pengertian, suatu sistem.

Imperialisme adalah paham dan pengertian bahwa imperialisme bukan pemerintah, bukan badan tetapi ia adalah nafsu, suatu sistim menguasai atau mempengaruhi ekonomi bangsa lain atau negeri, suatu sistem merajai atau mengendalikan ekonomi atau negeri bangsa lain (Sukarno,1965b).

Histori Imperialisme sebelumnya imperialisme tua dan selanjutnya imperialisme modern, imperialisme tua bangsa Portugis, Spanyol atau *East India Company* Inggris atau *Oos Indische Compagnie* Belanda dalam abad ke 16, 17, dan 18 dengan imperialisme modern dalam abad ke-19 atau ke-20, imperialisme modern menjaral kemana-mana di benua Eropa dan Amerika (Sukarno,1965b).

Imperialisme tua adalah imperialisme sebelum abad 19 dan imperialime tua pada hakekatnya sama dengan imperialisme modern yaitu nafsu, keinginan dan usaha dan berkecenderungan dengan sistem untuk menguasai atau mempengaruhi rumah tangga negeri lain atau bangsa lain. Dengan demikian terjadi perseteruan antarnegara lain yang menimbulkan penindasan dan penjajahan negara dalam mengambil ekonomi negara lain.

Imperialisme di Indonesia adalah imperialisme yang timbulnya bukan karena suatu *mechanische* dan *industrielle revolutie*, suatu imperialisme liberal, suatu imperialisme kuno, suatu imperialisme *orthodox* yang berusaha membunuh rakyat Indonesia (Sukarno, 2005).

Sebelum *industrielle revolutie* ketika dunia masih kuno imperialisme Belanda sudah melakukan aksi imperialismenya pada kerajaan-kerajaan di kepulauan Maluku, kerajaan Makassar, kerajaan Banten, kerajaan Mataram, dan semua kerajaan. Belanda bukanlah negara yang memiliki *modern industrialism*.

Imperialisme Belanda pada hakekatnya adalah monopolistis. Di dalam jaman *Compagnie* ia monopolis, di dalam jaman *na-compagnie* ia monopolistis, di dalam jaman *cultuurstelsel* ia monopolistis, di dalam zaman *modern-imperialisme* ia juga monopolistis. Imperialisme di Indonesia tidak lagi bernama imperialisme tua tetapi imperialisme modern.

Politik monopoli sebagai imperialisme Belanda, yaitu modern monopolistis di dalam hampir semua ekonomi politiknya. Imperialisme yang ada di Indonesia sudah menjadi raksasa yang makin lama makin bertambah tangan dan kepalanya. Imperialisme tua yang dulunya hanya sistem yang mengangkuti bekal-bekal hidup saja.

Imperialisme tua yang dulunya hanya membuat Indonesia menjadi sumber rejeki penghasilan (*levensmiddelengebied*) saja, imperialisme tua sudah menjelma menjadi imperialisme modern, pertama Indonesia tetap menjadi *levensmiddelengebied*, kedua Indonesia menjadi daerah penjualan (*afzetgebied*), Ketiga Indonesia menjadi daerah sumber daya (*grodstoffengebied*), keempat Indonesia menjadi daerah kegiatan eksploitasi (*exploitatiegebied*) sehingga menjadi kelebihan atau surplus modal (*buitenlands surpluskapitaal*) (Sukarno, 2005).

Di dalam imperialisme modern itu sudah menjadi imperialisme campuran. Tidak saja modal (*capital*) Belanda yang menjadi imperialisme di Indonesia tetapi *opendeur-politiek* juga modal Inggris, modal Amerika, modal Perancis-Belgia, modal Jepang, modal Jerman, juga modal Swiss yaitu imperialisme internasional yang bermiliar-miliar jumlah dan tenaganya.

Yang terjadi perusahaan imperialisme menjadi raksasa yang makin lama makin bertambah tangan dan kepala. Imperialisme tua yang dulunya terutama hanya sistem mengangkuti bekal-bekal hidup saja, kini sudahlah melar menjadi raksasa imperialisme modern yang empat macam saktinya. Pertama : Indonesia tetap menjadi negeri pengambilan bekal-bekal hidup. Kedua : Indonesia menjadi negeri pengambilan bekal-bekal hidup pabrik di Eropa. Ketiga: Indonesia menjadi negeri pasar penjualan barang-barang hasil macam-macam ke pabrik asing. Keempat : Indonesia menjadi lapangan usaha bagi modal yang ratusan, ribuan miliunan rupiah jumlahnya (Sukarno, 2002).

Marhaenisme Akarnya Pancasila

Marhaenisme adalah akarnya Pancasila suatu ideologi yang mendahului Pancasila dari latar belakang adanya kapitalisme dan imperialisme. Kapitalisme dan imperialisme melahirkan marhaenisme pemikiran Sukarno yaitu pertama diperlukan persatuan, rakyat (marhaen) harus bersatu dan tidak terpecah, kedua anti imperialisme artinya jangan ada penjajahan baik fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya dan lainnya, ketiga sosialisme keberpihakan kepada rakyat dan kesejahteraan bersama, keempat adalah nasionalisme yaitu kesadaran rasa memiliki negara.

Marhaen berbeda dengan Proletar, Marhaen yang terdiri dari aneka ragam rakyat miskin atau rakyat kecil mulai dari petani, pedagang kecil dan lainnya memiliki alat produksi tetapi tetap miskin tertindas, sedangkan Proletar adalah kaum buruh yang tertindas tidak punya alat produksi.

Pergaulan hidup Marhaen adalah pergaulan hidup yang sebagian besar terdiri dari kaum tani kecil, kaum buruh kecil, kaum pedagang kecil, kaum pelayar kecil, kaum Marhaen yang apa adanya semua kecil. Berbeda dengan konsep proletar dari kaum sosialis Barat terutama Komunis. Yaitu melahirkan kaum buruh sebagai golongan tertindas atau proletar, dan dalam konteks tujuannya negara tanpa kelas. Sebaliknya masyarakat Indonesia belum industrialis mempunyai kaum Marhaen yang juga sengsara dan miskin (Sukarno, 1999).

Inilah yang menjadi konsep Marhaenisme. Marhaenisme adalah Sosialisme Indonesia dan tidak menggunakan Demokrasi Liberal karena akan terjadi ketidakadilan di Indonesia yang kaya akan menjadi semakin kaya sedangkan yang miskin semakin miskin.

Asas pokok dalam marhaenisme adalah Asas Marhaen : pertama sosio-nasionalisme : asas pada saat berjuang bahwa setiap warganegara setiap masyarakat harus punya kesadaran sebagai bangsa yang mandiri dan merdeka, menyadarkan masyarakat tentang identitas kebangsaan, kalau tidak ada bangsa Indonesia tidak akan wujud : kesadaran kebangsaan harus muncul di tengah masyarakat dan juga bagi bangsa-bangsa lain juga memiliki kesadaran yang

sama (internasionalisme). Kedua, Sosio demokrasi: setelah punya negara merdeka, membangun struktur masyarakat yang terbuka demokrasi politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Ketiga, Ketuhanan Yang Maha Esa : karena orang Indonesia pasti religius dan beragama.

Implementasi dari gerakan Marhaen yang pertama adalah tahap Nasional Demokratis yaitu adanya kemandirian dan kemerdekaan tidak tergantung pada negara lain. Kedua tahap Sosialisme Indonesia adalah membangun Indonesia dan tahap ketiga Masyarakat Dunia Baru yaitu tatanan dunia yang adil tanpa kapitalisme dan imperialisme antarnegara.

Konsep ideologi itu kemudian diangkat kembali oleh Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, sewaktu Bung Karno menyampaikan Pancasila sebagai ideologi Negara dan ideologi Bangsa di depan sidang terbuka *Dokuritu Zyunbi Tyoosa Kai* yang lebih dikenal pula dengan nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).

Tetapi, pada waktu itu nama Marhaenisme tersebut tidak diperkenalkannya. Hanya dia memasukkan rumusan ideologi Marhaenisme itu ke dalam ideologi Pancasila yang ditawarkannya dalam sidang tersebut, yaitu Sosio-nasionalisme dan Sosio-demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Marhaenisme sebagai prinsip kebangsaan :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Sukarno prinsip Kebangsaan, Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau perikemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa, lima bilangan namanya bukan Panca Dharma tetapi namanya **Pancasila**, artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.

Bilangan lima boleh diperas tinggal tiga yaitu dua dasar yang pertama kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikemanusiaan diperas menjadi satu namanya sosio nasionalisme. Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi *politiek economische democratie*, politik demokrasi kesejahteraan sosial diperas menjadi satu namanya socio democratie, dan Ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Selanjutnya, dari tiga diperas menjadi satu yaitu Gotong Royong.

Sampai Indonesia merdeka Pancasila dituangkan dalam Konstitusi yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peganglah teguh Pancasila itu kelima-lima pasalnya satu persatu. Jangan hanya sebagian saja dari Pancasila itu yang kamu peluk, tetapi peluklah kelima-lima Silanya jua menjadi satu gabungan pegangan jiwa yang menghikmati segenap alam hidupmu (Sukarno, 1948).

Tata Indonesia Bagi Marhaen

Menurut Sukarno rakyat Indonesia miskin akibat penjajahan dan sistem kapitalisme. Dengan tatanan masyarakat yang tidak adil timbullah dalam hati untuk membasmi penjajahan. Dengan terhapusnya penjajahan dari bumi Indonesia akan merubah kehidupan rakyat Indonesia di segala bidang baik spiritual maupun material.

Sukarno menerangkan Marhaenisme bukanlah ilmu untuk mencari kedudukan atau kekayaan, melainkan ilmu untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, kepada nusa dan bangsa. Sasaran pokoknya adalah memperbaiki kehidupan jutaan Marhaen Indonesia baik rohani maupun jasmani.

Bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagian besar terdiri dari tani kecil, buruh kecil, pegawai kecil, pedagang kecil, pengusaha kecil, yang hidupnya selalu kekurangan. Mereka mempunyai nasib yang sama yang sehari-harinya hidupnya tertekan oleh gencetan pengusaha-pengusaha dan pemerintah. Golongan inilah yang dinamakan kaum Marhaen.

Jadi Marhaenisme adalah cara perjuangan dan azas yang menghendaki hilangnya sistem kapitalisme dan imperialisme. Kapitalisme adalah stelsel pergaulan hidup yang timbul dari cara produksi, yang karenanya nilai lebih (*meerwaarder*) tidak jatuh di dalam tangannya kaum buruh melainkan jatuh di dalam tangannya kaum majikan. Kapitalisme menyebabkan akumulasi kapital, konsentrasi modal, sentralisasi modal dan tenaga buruh berlebihan. Kapitalisme menimbulkan kemiskinan dan menyebar kesengsaraan. Kapitalisme melahirkan imperialisme yang membikin seluruh bangsa menjadi rakyat miskin dan sengsara.

Kemiskinan berlanjut pada bidang materi dan kerohanian dari generasi ke generasi. Di Indonesia petani memiliki rumah, sawah, cangkul dan lain-lain, tetapi senantiasa miskin. Kemiskinan akibat bangsa Indonesia dieksploitasi oleh kaum penjajah. Kaum Marhaen harus tetap berpegang pada tujuan perjuangannya yakni perbaikan nasib. Perbaikan nasib hanya dapat dicapai dalam masyarakat adil dan makmur sempurna tanpa penindasan dan penghisapan.

Cita-cita Sukarno adalah negara merdeka dan demokratis di mana kaum Marhaen berkuasa dan bukan borjuis Indonesia, bukan kaum ningrat Indonesia, bukan musuh-musuh Marhaen Indonesia. Kaum Marhaen harus sadar tujuan kemerdekaan untuk memperbaiki nasib, meningkatkan derajat hidupnya lebih baik dan bukan berabad-abad hidup statis tanpa ada perubahan kualitas hidup.

Harus sadar melawan kesengsaraan yang menimpanya dengan jalan menunjukkan bahwa biang keladi kesengsaraan rakyat adalah imperialisme. Jika rakyat ingin mencari perbaikan nasib, harus melawan dan menghapuskan kaum kolonial dan imperialisme.

Tatkala kita pada 17 Agustus 1945 dengan tekad bulat dan keras laksana peluru-baja mendirikan Republik, maka dada kita penuh dengan rasa cinta tanah air. Dan manakala kita sekarang mati-matian membentengi Republik itu, mati-matian merealisasikan isi semboyan kita "sekali merdeka, tetap merdeka" maka dada kita semua penuh meluap-luap, menyala-nyala, berkobar-kobar dengan api cinta tanah air (Sukarno, 1951).

Pada hakekatnya kemerdekaan nasional hanyalah jembatan, suatu syarat, satu saat perjuangan. Di belakang Indonesia merdeka kaum Marhaen masih harus membangun masyarakat yang bebas dari tiap-tiap kapitalisme dan imperialisme. Perbaikan nasib itu tidak datang sendirinya walaupun sudah merdeka. Perbaikan nasib harus diusahakan oleh kaum Marhaen dalam perjuangannya membangun masyarakat yang adil dan makmur, bebas dari penindasan dan penghisapan. Itulah tugas suci kaum Marhaen.

Yang dikehendaki Marhaen adalah negara Republik yang berdasarkan sistem politik ekonomi kerakyatan, yakni negara republik yang segala kedaulatannya ada di tangan rakyat. Baik urusan politik, urusan ekonomi, urusan pendidikan, urusan kebudayaan, urusan apa saja harus di bawah kendali rakyat.

Inilah demokrasi sejati yang dicita-citakan dengan nama baru sosio-demokrasi. Inilah demokrasi tulen yang hanya timbul dari nasionalisme Marhaen, dari nasionalisme yang di dalam batinnya sudah mengandung kerakyatan tulen, yang anti tiap-tiap macam kapitalisme dan imperialisme walaupun dari bangsa sendiri, yang penuh dengan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan yang menolak tiap-tiap rasa keborjuisan dan keningratan, nasionalisme yang saya sebutkan pula dengan nama baru sosio-nasionalisme. Hanya sosio-nasionalisme bisa melahirkan sosio-demokrasi, nasionalisme lain tidak bisa dan tidak akan melahirkan sosio-demokrasi; nasionalisme lain tidak bisa dan tidak akan melahirkan sosio-demokrasi.

Bung Karno adalah penggerak *nation and character builder* yang mencita-citakan sekaligus melakukan upaya riil demi terbentuknya suatu bangsa yang berkepribadian kuat dan khas dengan terus menerus membongkar semua kelemahan yang melekat dalam tubuh dan jiwa bangsa kita. Bung Karno simbol Nasionalisme Indonesia. Ia berhasil menjembatani perbedaan-perbedaan yang tercipta di antara suku, agama dan golongan yang ada di Indonesia dan menanamkan kepada mereka kesadaran tentang satu bangsa, bangsa Indonesia. Musuh terbesar

kolonialis Belanda dengan sendirinya Bung Karno sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Strategi politik Belanda memecah belah bangsa dengan *divide et impera*. Bangsa ini tidak boleh bersatu, harus terpecah belah. Itulah satu-satunya modal utama kaum penjajah.

Tata Indonesia dibangun di atas sejarah yang panjang dari penindasan kapitalisme dan imperialisme sampai Indonesia memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kita mendirikan Republik, karena kita cinta demokrasi, kesejahteraan dunia, persaudaraan bangsa. Kita mendirikan Republik untuk kebaikan kita sendiri dan untuk kebaikan dunia (Sukarno, 1965).

Proklamasi adalah pencetus dari perasaan yang sedalam-dalamnya yang terbenam di dalam kalbu sehingga memiliki pandangan hidup, tujuan hidup, punya falsafah hidup, punya rahasia hidup, sehingga selanjutnya dengan adanya Proklamasi beserta anak kandungnya yang berupa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai pegangan hidup yang boleh dibaca dan direnungkan setiap jam dan setiap menit. Tidak ada suatu bangsa di dunia ini yang mempunyai pegangan hidup begitu jelas dan indah, seperti bangsa kita ini. Malah banyak bangsa di muka bumi ini, yang tak mempunyai pegangan hidup sama sekali! (Sukarno, 1986). Tidak hanya mendirikan Negara Indonesia Merdeka tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa (Soekarno, 2003).

Dalam naskah Proklamasi “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya”

Proklamasi sebagai dasar tata Indonesia yang diejawantahkan melalui Pembukaan UUD 1945. “ Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Naskah Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 adalah satu. Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Naskah Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 adalah *loro-loroning atunggal*. Kita mempunyai *proclamation of independence* dan *declaration of independence* sekaligus. Pembukaan UUD 1945 mengikat bangsa Indonesia kepada prinsip sendiri dan memberitahu kepada seluruh dunia.

Proklamasi sumber kekuatan dan sumber tekad perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi kita itu adalah ledakan pada saat memuncaknya *krackt total* semua tenaga-tenaga nasional, badaniah dan batiniah, fisik dan moril, materil dan spiritual (Soekarno, 2003). Pembukaan UUD 1945 memberikan pedoman-pedoman tertentu untuk mengisi kemerdekaan nasional, untuk melaksanakan kenegaraan, untuk mengetahui tujuan dalam mengembangkan kebangsaan, untuk setia kepada suara batin yang hidup dalam kalbu rakyat.

Karena itu Proklamasi dan UUD 1945 adalah pengejawantahan isi jiwa yang sedalam-dalamnya dari seluruh Marhaen di Indonesia sebagai Dasar Tata Indonesia untuk menjalankan struktur kelembagaan negara dan implementasi untuk mencapai cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh Marhaen di Indonesia.

Tata Indonesia dengan dasar Proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 yaitu menghilangkan bentuk-bentuk kapitalisme dan imperialisme yang bertentangan dengan kedaulatan bangsa Indonesia dan menghidupkan kembali kepribadian bangsa Indonesia dalam arti seluas-luasnya yaitu kepribadian politik, kepribadian ekonomi, kepribadian sosial, kepribadian kebudayaan yang semua itu adalah Kepribadian Nasional.

Kemerdekaan dan kepribadian nasional adalah tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemerdekaan untuk bersatu, kemerdekaan untuk berdaulat, kemerdekaan untuk adil dan makmur, kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum, kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemerdekaan untuk ketertiban dunia, kemerdekaan untuk perdamaian abadi, kemerdekaan untuk keadilan sosial, kemerdekaan yang berkedaulatan rakyat, kemerdekaan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, kemerdekaan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, kemerdekaan yang berdasarkan Persatuan Indonesia, kemerdekaan yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, kemerdekaan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi marhaenisme berkaitan dengan norma-norma hukum dan moral, kebijakan dalam negara sebagai bangsa yang bermartabat mendasarkan pada moral Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, dan Keadilan sehingga manifestasi hidup manusia sebagai manusia yang bermartabat kemanusiaan. Oleh karena itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diwujudkan dasar nilai moralitas yang beradab dan bermartabat.

Dalam merealisasikan cita-cita negara bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan secara kodrati dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Negara dan bangsa akan eksis dan berkembang dengan baik manakala dikembangkan rasa kebersamaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Negara akan berkembang ke arah kehidupan yang lebih baik manakala rakyat (marhaen) diletakkan sebagai asal mula dan tujuan dari kekuasaan negara serta jaminan keadilan dalam hidup bersama.

Nilai-nilai yang terkandung dalam marhaenisme secara sistemik merupakan sumber nilai bagi penjabaran norma-norma etik politik yang bermartabat dan berkeadaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang mendasarkan prinsip-prinsip dalam perspektif moral dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Cita-cita yang ingin dicapai yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar cita-cita negara maka negara mewujudkan dalam suatu dasar tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Kesimpulan :

Tata Indonesia bagi Marhaen yaitu tatanan negara untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai dasar cita-cita negara yaitu mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dengan dasar cita-cita Proklamasi yang diejawantahkan ke dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Saran :

1. Tata Indonesia dilaksanakan berdasarkan Marhaenisme sebagai akar dari Pancasila sebagai dasar negara.
2. Tata Indonesia dilaksanakan tanpa kapitalisme dan imperialisme.

Daftar Pustaka :

- Soekarno. (2003). *Bapak Indonesia Merdeka Sebuah Biografi 1901 – 1945*, Jakarta: Hatra Mitra
- Sukarno. (1948). *Bung Karno Kepada Bangsaku*. Yogyakarta: OP Guntur
- Sukarno. (1951). *Sarinah Kewajiban Wanita Dalam Perjuangan Republik Indonesia*. Jakarta:
- Sukarno. (1956). *Indonesia Menggugat*, Jakarta: S.K Seno

- Sukarno. (1965a). *Amanat Presiden Sukarno pada Pembukaan Konperensi para Gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara, pada tanggal 13 Desember 1965*.
- Sukarno. (1965b). *Di bawah Bendera Revolusi*. Jilid kedua, Jakarta: Yayasan Bung Karno,
- Sukarno. (1984b). *Bung Karno Sebuah Bibliografi*. Jakarta: Inti Idayu Press
- Sukarno. (1986). *Amanat Proklamasi*, Jakarta: Inti Idayu Press, Yayasan Pendidikan Soekarno
- Sukarno. (1999). *Bung Karno Tentang Marhaen dan Proletar*. Jakarta: Grasindo
- Sukarno. (2002). *Menghadapi Imperialisme dan Kapitalisme, Tujuan Revolusi Tidak Bisa Diubah*. Jakarta: Indonesia Baru
- Sukarno. (2005) *Di bawah Bendera Revolusi*, Jilid pertama cetakan kelima, Jakarta: Yayasan Bung Karno.